

PENGARUH KREDIT CANDAK KULAK TERHADAP MASYARAKAT PEDESAAN

Nancy Kumalasari RUSTANDI

Dalam Pelita III perhatian pemerintah terutama diarahkan untuk menciptakan pembagian pendapatan yang adil dan merata, memperluas kesempatan kerja, berusaha dan berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satu langkah yang telah diambil adalah kebijaksanaan untuk memberikan fasilitas modal kerja dalam bentuk kredit dengan persyaratan yang ringan. Bagi para pedagang kecilpun diberikan kredit yang serupa, yang dikenal dengan istilah Kredit Candak Kulak (KCK). Pedoman pelaksanaannya dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 4 tahun 1979, tetapi realisasinya telah dimulai sejak tanggal 25 Nopember 1976.

Selama ini masyarakat pedesaan sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang ringan, untuk mengganti kredit yang tidak terorganisasi (unorganized market) dengan tingkat bunga yang tinggi. Pemerintah berusaha untuk memenuhi harapan mereka dengan bantuan Kredit Candak Kulak, yang persyaratannya dianggap cukup ringan. Dalam tulisan ini hendak ditunjukkan, apakah kredit ini sungguh dapat menggantikan kedudukan kredit yang sudah berjalan sebelumnya? Hasil konkrit apa yang dapat dicatat dan kekurangan mana yang masih dirasakan selama ini? Bagaimana pengaruh kredit tersebut bagi masyarakat

ANALISA

pedesaan? Tulisan ini bertitik tolak pada masyarakat pedesaan yang pada umumnya merupakan petani-petani miskin yang selalu tergantung pada para pemberi pinjaman.

PENGETERIAN KREDIT CANDAK KULAK

Pelaksanaan Kredit Candak Kulak harus ditinjau dari tujuan dan arti yang terkandung dalam pengertian Candak Kulak itu. Secara harafiah, pengertian "Candak Kulak" adalah apa yang dapat dipegang (candak), seperti hasil pertanian, perkebunan dan sebagainya, dibeli dan kemudian segera dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan (kulak). KCK dimaksudkan untuk menanggulangi perekonomian masyarakat desa, atau dengan kata lain, untuk membantu para pedagang kecil (bakulan) agar mereka lama kelamaan dapat berusaha dengan modal sendiri dan meningkatkan taraf hidup mereka. Peraturan mengenai kredit ini dibuat sangat sederhana dan diharapkan dapat mengurangi beban petani terhadap hutang lain yang tingkat bunganya lebih tinggi. Dengan bunga 1% per bulan, mereka dapat meminjam uang sebesar Rp. 1.000,— sampai Rp. 15.000,— sesuai dengan jenis dagangan dan kebutuhan akan modalnya. Jangka waktu peminjaman berkisar antara 5 hari sampai 3 bulan. Setiap nasabah diwajibkan untuk menabung sebanyak 4% dari jumlah pinjaman mereka dan diharapkan agar di waktu-waktu yang akan datang mereka dapat mempermodali diri sendiri (self-financing) dari uang tabungan mereka. Dengan demikian KCK ini sejalan dengan program pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja, meratakan pendapatan masyarakat dan meningkatkan produksi di daerah pedesaan.

Pelaksanaan KCK ini dilakukan melalui BUUD/KUD setempat, dan bagi setiap nasabah yang ingin mendapatkan KCK diharuskan menunjukkan semacam rekomendasi dari kepala desa (lurah), tetangga dan lain-lain di desanya masing-masing.

PENGARUH TERHADAP MASYARAKAT PEDESAAN

Titik tolak penulisan ini adalah petani-petani miskin dan kaitannya dengan KCK sebagai pengganti jenis kredit yang dipin-

jam dengan tingkat bunga yang tinggi. Mampukah KCK melepaskan ketergantungan masyarakat desa pada kredit-kredit yang selama ini ada di daerah pedesaan?

Tinjauan mengenai masyarakat pedesaan merupakan suatu masalah yang menarik, baik dari sudut ekonomi, sosial budaya maupun dari sudut lainnya, karena masyarakat desa mempunyai ciri yang khas yang berlainan dengan masyarakat di kota. Pemikiran yang sederhana dan ketidak-tahuan mereka merupakan ciri yang paling menyolok yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Berdasarkan ciri yang khas inilah penulis membuat pembahasannya.

Pemikiran yang sederhana dan ketidak-tahuan sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Mereka jauh dari kota, jauh dari semua alat komunikasi kecuali radio dan jauh pula dari suatu lembaga yang diharapkan dapat menjadi saluran aspirasi mereka. Oleh karenanya banyak hal yang tidak mereka ketahui. Di samping itu merekapun selalu berpikir secara sederhana dan praktis, dalam arti apa yang akan mereka lakukan tidak membutuhkan prosedur yang berbelit dan membingungkan.

Bila melihat struktur pemikiran masyarakat desa yang demikian, KCK diberikan dengan maksud untuk menyediakan permodalan yang murah, sederhana dan tidak berbelit-belit prosedurnya, di samping untuk menanamkan kebiasaan menabung. Dengan demikian seharusnya tampak hubungan yang sinkron antara ciri-ciri masyarakat pedesaan dan sasaran KCK.

Permodalan yang murah selalu dikaitkan dengan tingkat bunga yang rendah. Apakah memang sudah terjadi hal ini pada KCK? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat faktor mana yang akan dijadikan pembandingnya, kredit yang ada selama ini di daerah pedesaan yang lazimnya disediakan oleh kreditur swasta ataukah kredit yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat baik yang tinggal di kota maupun di pedesaan. Bagaimanapun juga faktor pembanding merupakan salah satu unsur yang penting dalam menetapkan tinggi ren-

dahnya tingkat bunga. Sebagai unsur pembanding pertama adalah kredit-kredit yang tidak terorganisasi dengan tingkat bunga antara 20 sampai 30 persen sebulan disertai berbagai jaminan. Sering pula dikenal kredit di daerah pedesaan yang sistem ijon, di mana para petani meminjam uang dari pemberi pinjaman dan pelunasannya dibayar dengan hasil pertanian mereka yang dinilai pada saat belum menghasilkan sesuatu. Pada saat itu tingkat harga mungkin berada di bawah tingkat harga yang akan dicapai pada saat dijual sesudah panen. Adanya berbagai kredit di daerah pedesaan menggambarkan bahwa masyarakat pedesaan memang sangat membutuhkan bantuan kredit untuk melanjutkan usaha mereka di bidang pertanian, baik sebagai petani kecil maupun sebagai buruh tani. Usaha-usaha yang telah dilakukan selama ini ternyata dapat membantu mereka untuk melanjutkan usahanya walaupun lama kelamaan ada kemungkinan mereka akan menjadi bertambah miskin

Tabel 1

SUKU BUNGA PINJAMAN MODAL KERJA MENURUT SEKTOR EKONOMI

	1 April 1976 (per bulan)	1 Januari 1978 (per bulan)
I. Kredit Modal Kerja Permanen	15	12
II. Pinjaman Modal Kerja		
1. Pengadaan dan penyaluran beras/gabah/padi dan jagung oleh BUUD/KUD	9	9
2. Bimas dan Inmas padi dan palawija	12	12
3. Pengumpulan dan penyaluran garam rakyat oleh BUUD/KUD dan PN Garam serta pinjaman modal kerja PN Garam	12	12
4. Pengumpulan dan penyaluran hasil pertanian, peternakan dan perikanan oleh BUUD/KUD dan Koperasi	15	12
5. Pertanian rakyat dan kerajinan rakyat	15/18	12
6. Peternakan, unggas dan perikanan rakyat	15/18	12
7. Industri dan jasa-jasa		
a. Penggilingan padi/huller	15	13,5
b. Alat-alat pertanian	18	13,5

Sumber : Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia* (Jakarta : Agustus-September 1978) hal. 68-69

apabila tingkat bunga tidak sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar kembali. Sebenarnya diharapkan Kredit Candak Kulak dapat melepaskan mereka dari keadaan demikian, terhindar dari kerugian-kerugian karena sistem ijon, dan sekaligus kesempatan untuk memperoleh kredit dengan mudah dan tingkat bunga yang rendah.

Sebagai unsur pembanding lainnya dapat dilihat tingkat bunga kredit yang diberikan oleh pemerintah, seperti tampak dalam Tabel 1.

Tingkat bunga KCK, sejak diadakannya pada tanggal 25 Nopember 1976 sampai saat ini, tidak pernah berubah. Dari tabel di atas tampak jelas bahwa tingkat bunga KCK sama dengan tingkat bunga beberapa jenis pinjaman modal kerja yang jangkauannya lebih luas.

Tingkat bunga tidak dapat ditinjau terlepas dari jangka waktu pinjaman. Tentang hal ini ada dinyatakan bahwa "the cost aspect of the maturity decision involves the term structure of interest rates, or the relationship between the maturity of debt and the interest rate on the debt".¹ Dalam pernyataannya itu Weston menjelaskan bahwa "the term structure of interest rates" menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan jangka waktu pinjaman. Pendapat tersebut diterangkan dalam teori yang menjelaskan bahwa dalam menetapkan tingkat bunga pinjaman untuk jangka waktu yang berbeda (jangka panjang atau jangka pendek), harus dihitung dahulu jenis pinjaman mana yang lebih menguntungkan, tentunya berdasarkan harapan bahwa tingkat bunga di masa yang akan datang akan meningkat. Bilamana tingkat bunga jangka pendek diharapkan meningkat pada masa yang akan datang, tingkat bunga jangka panjang yang berlaku akan lebih tinggi daripada tingkat bunga jangka pendek yang berlaku atau sebaliknya.²

Dari uraian di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa tinggi rendahnya tingkat bunga tergantung pula pada harapan di

1 J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, *Managerial Finance* (Hinsdale, Illinois : The Dryden Press, 1975, fifth ed.) hal. 128

2 *Ibid.* hal. 144-146

masa yang akan datang, karena masa yang akan datang selalu berkaitan dengan ketidak-pastian, yang biasanya banyak ditentukan oleh faktor resiko, misalnya turunnya tingkat bunga, turunya nilai uang dan sebagainya.

Permodalan yang dibiayai oleh pinjaman jangka pendek umumnya lebih murah daripada pinjaman jangka panjang. Seharusnya prinsip ini juga berlaku untuk KCK. Candak Kulak merupakan kebutuhan yang bersifat jangka pendek, yang dapat dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Namun perlu diperhatikan bahwa peminjam KCK adalah masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, yang merupakan golongan ekonomi lemah, bahkan mungkin terlemah, sehingga untuk mendapat modal yang kecilpun cukup sulit. Bukan merupakan suatu penyelesaian apabila meniadakan pemberi pinjaman yang selama ini beroperasi di daerah pedesaan dan menggantikannya dengan kredit jenis lain yang terorganisasi tetapi tidak meringankan beban mereka. Sebagai contoh, di desa selama ini sudah berjalan kegiatan pinjam-meminjam yang terorganisasi, seperti pemberian pinjaman oleh Badan Kredit Kecamatan (BKK), Badan Kredit Desa (BKD) dan Lumbung Desa (LD) yang sudah beroperasi untuk waktu yang cukup lama. Biasanya tingkat bunga yang berlaku berkisar antara 1 sampai 10 persen sebulan untuk jangka waktu yang singkat (kurang dari 1 tahun).

Selama ini memang belum terdengar keluhan-keluhan dari para nasabah KCK. Hal ini tidak berarti bahwa segala sesuatunya telah berlangsung dengan baik. Para nasabah KCK adalah masyarakat kecil yang berada di daerah pedesaan yang mungkin tidak berani dan tidak dapat menyampaikan keluhan mereka melalui berbagai media yang ada. Data kuantitatif yang ada belum dapat mencerminkan keadaan yang terjadi sehubungan dengan diselenggarakannya KCK ini. Dalam tulisan ini hanya akan dilakukan analisa kualitatif. Di atas telah dilakukan perbandingan tingkat bunga dengan beberapa pinjaman modal kerja lainnya. Jumlah Kredit Candak Kulak sangat kecil dibandingkan dengan kredit bantuan untuk golongan ekonomi lemah lainnya, tetapi tidak demikian halnya dengan

tingkat bunga. Kemampuan meminjam para nasabah KCK ini kecil, dan modal yang dibutuhkan tidak besar. Tetapi tingkat bunga yang dikenakan pada KCK sama dengan pinjaman-pinjaman lain. Bagi nasabah kredit lain bunga ini secara efektif cukup rendah, tetapi tidak demikian halnya bagi para nasabah KCK. Sebagai bahan perbandingan, seandainya diberikan Kredit Candak Kulak sebanyak Rp. 15.000,— setelah 1 bulan bunganya sebesar Rp. 150,— ditambah tabungan wajib sebesar 4% dari pinjaman yaitu Rp. 600,— berarti dalam 1 bulan dia harus membayar bunga tabungannya sebesar Rp. 750,—. Dengan demikian dalam 1 bulan harus diangsur sebesar Rp. 15.750,—. Bilamana pelunasan dilakukan setiap 5 hari sekali maka jumlah angsuran setiap kalinya sebesar Rp. 2.687,50 dan dilakukan selama enam kali berturut-turut. Walaupun secara kuantitatif jumlah ini cukup kecil, tetapi berdasarkan jenis usaha yang mereka lakukan, jumlah ini sebenarnya cukup besar, sehingga harus dipertimbangkan untuk meringankan beban mereka dengan cara meningkatkan subsidi bagi mereka, antara lain dengan meninjau kembali tingkat bunga yang telah ditetapkan. Yang harus selalu menjadi bahan pertimbangan adalah masyarakat pedesaan membutuhkan permodalan yang mudah, murah, cepat dan tepat.¹ Yang dimaksud adalah tidak banyak dibutuhkan tanda tangan dan surat-surat, tingkat bunga cukup rendah atau bahkan serendah mungkin, tersedia dana pada saat dibutuhkan dan diperoleh jumlah yang sama dengan yang dibutuhkan dan dan diperoleh jumlah yang sama dengan yang dibutuhkan. Di sinilah biasanya terdapat perbedaan pelayanan antara sistem ijon dan kredit-kredit lain yang tidak terorganisasi dengan kredit yang diberikan oleh pemerintah. Sistem ijon dan kredit lainnya pada dasarnya telah dapat memenuhi ketiga syarat yang lain, kecuali tingkat bunga, sedangkan kredit pemerintah mungkin sampai saat ini baru dapat memenuhi tingkat bunga yang relatif lebih rendah daripada tingkat bunga pada sistem kredit tidak terorganisasi.

1 Ace Partadiredja, "Rural Credit : the Ijon System", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. X No. 3 Nopember 1974, hal. 55

Untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah oleh para pemberi pinjaman yang tidak terorganisasi jelas tidak mungkin, karena mereka harus mengumpulkan dana pinjaman dari banyak pihak dalam jumlah yang masing-masing sangat kecil. Hal inilah yang menyebabkan mereka memberikan pinjaman pada masyarakat dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tingkat bunga yang umumnya berlaku. Walaupun demikian, masyarakat desa tetap akan senang meminjam dari para pengijon atau pemberi pinjaman lainnya karena mereka dapat segera meminjam sesuai dengan yang dibutuhkan tanpa prosedur yang berbelit-belit. KCK seharusnya bisa memenuhi harapan masyarakat di daerah pedesaan tersebut, karena prosedurnya cukup sederhana, apabila tidak dilakukan tekanan-tekanan oleh kepala desa yang berwenang dalam memberikan rekomendasi. Sejauh pelaksanaan kredit ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka tidak akan dialami kesulitan dalam kelangsungan hidup kredit ini dan lambat laun dapat digantikan kedudukan pemberi pinjaman yang tidak terorganisasi dan sekaligus para nasabah diarahkan pada kebiasaan menabung dan mempermodali diri sendiri.

Perkembangan KCK selama ini, seperti dinyatakan dalam Tabel 2 menunjukkan peningkatan jumlah nasabahnya. Hal ini menunjukkan adanya minat yang semakin besar dari para pedagang kecil untuk memanfaatkan kredit ini. Usaha pemerintah ini diharapkan akan dapat dikembangkan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih sangat miskin dan yang sangat membutuhkan bantuan keuangan. Sebagai suatu program baru, KCK telah berhasil membantu 1.205.487 orang nasabah dari 12 propinsi yang dilaksanakan oleh 1.596 BUUD/KUD. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia di daerah pedesaan yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 11,88% dari 40.408.678 penduduk yaitu sekitar 4,8 juta penduduk,¹ maka jumlah nasabah KCK ini masih sedikit sekali artinya, sekitar 25%, sehingga masih harus dikembangkan lebih lanjut secara lebih intensif. Jangan sampai kredit ini tidak memberikan perubahan yang berarti, tetapi justru dapat mengem-

1 Biro Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, September-Desember 1976 (Jakarta : BPS, 1978), hal. xx

Tabel 2

HASIL KEGIATAN PELAKSANAAN PERKREDITAN CANDAK KULAK

No. Propinsi	Akhir Maret 1977								Akhir Maret 1978							
	Pelaksanaan Pemberian Pinjaman				Sisa Pinjaman				Pelaksanaan Pemberian Pinjaman				Sisa Pinjaman			
	Jumlah koperasi	Jumlah nasabah	Jumlah pinjaman (ribu rp)	Jumlah pinjaman rata-rata (rp)	Jumlah koperasi	Jumlah nasabah	Jumlah pinjaman (ribu rp)	Jumlah pinjaman rata-rata (rp)	Jumlah koperasi	Jumlah nasabah	Jumlah pinjaman (ribu rp)	Jumlah pinjaman rata-rata (rp)	Jumlah koperasi	Jumlah nasabah	Jumlah pinjaman (ribu rp)	Jumlah pinjaman rata-rata (rp.)
1. DKI Jakarta	5	1.003	9.890,0	9.860	5	482	2.726,9	5.658	30	9.123	90.681,9	9.940	30	2.682	18.926,6	7.057
2. Jawa Barat	53	22.378	102.501,4	4.581	53	10.346	28.371,8	2.742	244	140.546	749.625,8	5.334	244	48.797	155.789,3	3.193
3. Jawa Tengah	155	61.593	224.140,4	3.639	155	35.833	79.923,9	2.231	388	263.258	1.279.427,1	4.860	388	80.752	228.462,2	2.829
4. DI Yogyakarta	55	25.046	121.372,5	4.846	55	12.551	32.813,5	2.614	68	103.150	643.464,9	6.238	68	19.071	73.785,3	3.869
5. Jawa Timur	239	123.576	429.542,4	3.476	239	68.034	135.229,9	1.988	507	588.209	2.395.263,8	4.072	507	97.957	386.901,3	3.050
6. Bali	26	6.301	42.430,0	6.734	26	3.244	13.356,3	4.117	60	37.105	250.077,0	6.740	60	8.225	37.985,4	4.618
7. Nusa Tenggara Barat	—	—	—	—	—	—	—	—	33	9.326	37.796,9	4.053	33	5.055	12.444,4	2.462
8. Sulawesi Selatan	—	—	—	—	—	—	—	—	98	19.744	178.146,8	9.023	98	10.816	49.404,9	4.568
9. Sulawesi Utara	—	—	—	—	—	—	—	—	24	5.379	41.195,1	7.659	24	3.106	14.090,7	4.537
10. Sumatera Utara	—	—	—	—	—	—	—	—	74	11.745	119.383,3	10.165	74	6.441	37.561,1	5.832
11. Sumatera Barat	—	—	—	—	—	—	—	—	49	10.512	72.893,7	6.934	49	7.188	23.748,8	3.304
12. Lampung	—	—	—	—	—	—	—	—	19	7.750	41.791,0	5.392	19	4.481	8.750,6	1.953
	533	239.897	929.876,7		553	130.490	292.422,3		1.596	1.205.847	5.899.747,3		1.596	294.931	1.047.850,6	

Sumber : Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 1978

ANALISA

bankan hasil yang sudah mulai tampak. Berkurangnya ketergantungan masyarakat-masyarakat pedesaan pada para pemberi kredit yang tidak terorganisasi, lama kelamaan dapat memperkecil bahkan menghilangkan peranan kredit yang tidak terorganisasi tersebut. Ini merupakan suatu pengaruh konkrit yang dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan selama kredit ini dijalankan.

Dalam Tabel 2 ditunjukkan perubahan-perubahan yang ada baik dalam jumlah propinsi maupun dalam jumlah nasabah dan besar pinjaman rata-rata. Melihat perubahan-perubahan yang ada, menunjukkan bahwa jangkauan KCK menjadi semakin luas dan rata-rata pinjaman juga semakin meningkat, terutama di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta kenaikan mencapai lebih dari Rp. 1.200,— per nasabah. Bila ditinjau secara terperinci di keenam propinsi yang telah melaksanakan KCK sejak akhir tahun 1976, tampak adanya peningkatan dalam jumlah pinjaman rata-rata dan jumlah nasabah yang semakin besar setelah kredit ini berjalan lebih kurang 1 tahun. Secara terperinci Tabel 3 menunjukkan peningkatan dalam pemberian KCK.

Tabel 3

PERKEMBANGAN PEMINJAMAN KCK MARET 1977 — MARET 1978			
No. Propinsi	Peningkatan pinjaman rata-rata (rupiah)	Peningkatan jumlah nasabah (persen)	Peningkatan sisa pinjaman rata-rata (rupiah)
1. DKI Jakarta	80	809,6	1.399
2. Jawa Barat	753	528,0	451
3. Jawa Tengah	1.221	327,4	598
4. DI Yogyakarta	1.392	311,8	1.255
5. Jawa Timur	596	376,0	1.962
6. Bali	6	488,9	501

Tabel di atas menunjukkan bahwa di DKI Jakarta pinjaman rata-rata tidak besar, tetapi peningkatan jumlah nasabah dan sisa pinjaman rata-rata justru menunjukkan penambahan yang sangat besar. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi,

kesanggupan nasabah untuk mengembalikan cicilannya kecil, tetapi kebutuhan akan modal terus bertambah, usahanya kurang maju atau dapat juga kelalaian dari pihak nasabah sendiri untuk mengembalikan pinjaman sehingga tunggakannya menjadi bertambah besar. Daerah Jawa Barat menunjukkan kemajuan baik dalam pinjaman rata-rata, jumlah nasabah, maupun sisa pinjaman rata-rata. Dengan demikian dapat dikatakan secara relatif KCK di daerah Jawa Barat berjalan dengan cukup baik, dengan catatan bila ukuran yang dipakai adalah ukuran kuantitatif yang ada. Daerah Jawa Tengah menunjukkan hasil yang terbaik dibandingkan dengan kelima daerah lainnya. Di Yogyakarta memperlihatkan sisa pinjaman rata-rata yang meningkat cukup besar hampir berimbang dengan peningkatan pinjaman rata-rata. Jawa Timurpun memperlihatkan peningkatan sisa pinjaman rata-rata yang cukup tinggi sedangkan peningkatan pinjaman rata-rata hanya mencapai sepertiganya. Demikian pula dengan daerah Bali, bahkan hampir tidak terdapat peningkatan dalam jumlah pinjaman rata-rata. Sebenarnya suatu sistem kredit yang baik tidak menekankan pada pelunasan kredit yang diberikan, melainkan pada kemampuan nasabah untuk membayar bunga serta mengembangkan usahanya. Alasan ini disebabkan oleh pengertian bahwa usaha yang baik akan berlangsung secara terus menerus dan semakin berkembang, sehingga seakan-akan kredit yang telah dibayarkan dipinjamkan kembali kepada nasabah semula, demikian seterusnya.

HAMBATAN YANG DIALAMI

Selama ini sering dimuat dalam harian-harian tentang tekanan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan bantuan kredit untuk golongan ekonomi lemah di daerah pedesaan. Rupanya banyak di antara oknum-oknum tersebut yang mempergunakan kesederhanaan cara berpikir masyarakat pedesaan untuk menekan ataupun menipu mereka, seperti misalnya memperpanjang prosedur, meminta uang pelicin dan sejenisnya. Hal-hal seperti ini yang sering menghambat jalannya usaha bantuan terhadap

masyarakat kecil. Bilamana keadaan ini tidak segera diperbaiki, kemungkinan besar para peminjam uang akan lari kembali kepada para pemberi pinjaman yang tidak terorganisasi tadi yang selalu lancar dengan prosedur. Masyarakat yang masih sederhana cara berpikirnya, jarang mempertimbangkan soal likuiditas atau kemampuan untuk melunasi hutang di waktu yang akan datang, tetapi lebih menitik beratkan pada lancarnya prosedur dan setiap kali membutuhkan uang dapat segera menerimanya. KCK akan dapat memenuhi harapan para pedagang kecil, bilamana pelaksanaannya dilakukan dengan tertib sehingga dapat membimbing mereka pada disiplin pinjam-meminjam yang semestinya. Prosedur yang harus dilampaui tidak boleh menyimpang dari peraturan yang tertera pada Inpres Perkreditan tentang Candak Kulak dan tingkat bunga perlu ditinjau kembali. Dengan demikian masyarakat pedesaan sungguh-sungguh dapat menikmati bantuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Mulai tahun 1979 ini industri kecil yang membutuhkan tambahan modal dapat memperoleh KCK yang jumlah maksimumnya sebesar Rp. 100.000,— dengan syarat nasabah adalah anggota salah satu koperasi dan mendapatkan rekomendasi dari koperasi yang bersangkutan. Pinjaman inipun diberikan tanpa jaminan. Hal ini dikemukakan oleh Dirjen Industri Kecil Gito Sewoyo di Magetan Yogyakarta.⁵ Bila benar yang dimaksudkan dalam pernyataan ini adalah KCK dan bukan Kredit Kecil, maka dapat ditimbulkan masalah-masalah sebagai berikut : (1) mengaburkan tujuan pengadaan KCK yang sebenarnya tidak ditujukan kepada para petani *produsen* (dalam arti untuk meningkatkan produksi pangan), tetapi untuk para *pedagang kecil* seperti penjual tempe, telur, jamu, rokok dan lain-lain dan petani miskin. Biasanya bila panen belum tiba, petani miskin melakukan pekerjaan sebagai bakul untuk menutup kebutuhan hidup mereka. Dalam Candak Kulak barang-barang yang diperdagangkan tidak sama setiap harinya, karena yang diperjualbelikan di masyarakat pedesaan berkisar pada kebutuhan sehari-hari seperti hasil pertanian yang berupa sayur-mayur, palawija dan lain-lain. Dengan diberikannya kesempatan untuk

5 *Angkatan Bersenjata*, 8 Februari 1979

meminjam KCK bagi industri kecil, istilah Candak Kulak ini tidak sesuai lagi. Secara singkat dapat dikatakan yang menjadi sasaran KCK adalah mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan modal untuk berusaha guna menutup biaya hidupnya sehari-hari; (2) perbedaan fungsi KCK dengan Kredit Kecil menjadi tidak jelas. Sebelum diperkenalkannya KCK, pemerintah sudah memberikan beberapa jenis kredit bantuan untuk golongan ekonomi lemah, di antaranya Kredit Kecil atau Kredit Mini untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan baik untuk keperluan investasi maupun modal lancar usaha, yang besarnya berkisar antara Rp. 10.000,— sampai Rp. 100.000,—. Jumlah pinjaman KCK jauh lebih kecil dari kredit-kredit di atas dan digunakan untuk berdagang saja. Bertambah besarnya jumlah pinjaman untuk membantu industri kecil diikhawatirkan akan mendesak para pedagang kecil (bakul) yang kebutuhan modalnya kecil dan keuntungan yang diperoleh hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

PENUTUP

Secara singkat, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat desa jangan hanya dijadikan obyek program pemerintah saja, tetapi sungguh dapat menikmati hasil dari program tersebut, sesuai dengan harapan mereka dan mereka pun dapat menikmati sarana yang sama seperti yang telah dinikmati oleh rekan-rekannya di kota. Pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha jangan hanya merupakan slogan yang indah, yang tetap merupakan angan-angan tetapi dapat merupakan hasil pembangunan nyata yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat di daerah pedesaan, sehingga dengan demikian pengaruh yang besar dan positif dapat semakin mereka nikmati.

Dalam tulisan ini hanya dikemukakan sebagian kecil dari angan-angan masyarakat desa yang dicoba untuk direalisasi oleh pemerintah melalui pelaksanaan KCK yakni permodalan dalam skala kecil tetapi yang murah, mudah, cepat dan tepat. KCK merupakan kredit yang mempunyai ciri khas yang digunakan un-

tuk membantu permodalan para pedagang kecil di daerah pedesaan. Selama ini belum pernah pemerintah memikirkan bantuan kredit bagi para petani miskin di pedesaan. KCK merupakan kredit pertama yang ditujukan untuk kepentingan tersebut. Sampai saat ini belum semua pedagang kecil di pedesaan dapat memanfaatkan KCK ini, bahkan baru 25% dari antara mereka yang berhasil memanfaatkannya. Perbaikan dan penyesuaian dalam segala hal perlu diadakan untuk menyempurnakan pelaksanaan Inpres mengenai Perkreditan CandaK Kulak ini, seperti peninjauan kembali tingkat bunganya, pengenalan KCK secara lebih meluas di seluruh pelosok Indonesia disertai dengan pengarahannya dan sebagainya.

... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...

REVISI

... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...

... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...
... dan digunakan untuk pedagang kecil...